



# **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PENGEMBANGAN DAN UJICOBA MODEL-MODEL  
KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
PENDIDIKAN DASAR**

Langkah Ke: 1

**PENYUSUNAN DESAIN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
2007**



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN UJICOBA MODEL-MODEL  
KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS  
PENDIDIKAN DASAR

Langkah Ke: 1

PENYUSUNAN DESAIN

NO. INDUK
NO. KLASIFIKASI
TGL. TERIMA
DARI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
2007

# PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

## LAPORAN KEGIATAN LANGKAH 1

### PENYUSUNAN DESAIN

#### I. LATAR BELAKANG

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, yaitu dalam pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang juga ditegaskan dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di *daerah terpencil atau terbelakang*, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan *tidak mampu dari segi ekonomi* sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki *kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran* karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang dikarenakan sosial ekonomi rendah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang utamanya adalah melakukan kajian konsep tentang pendidikan layanan khusus. Kajian ini melibatkan para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam mengupas berbagai persoalan pendidikan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut. Kajian ini juga melibatkan para pakar dan praktisi berbagai keahlian untuk mencari bentuk-bentuk atau model-model kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan persoalan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dalam proses pengembangan model kurikulum layanan khusus ini diperlukan kajian yang cermat dan tepat sasaran, sehingga untuk kebutuhan validitas data dan model yang dihasilkan, para pengembang kurikulum ini harus tinggal/menenetap di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

## **II. TUJUAN**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun desain pengembangan model-model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, sosial ekonomi rendah, dan yang mengalami kesulitan belajar.

## **III. HASIL YANG DICAPAI**

Kegiatan ini menghasilkan:

1. Desain kegiatan model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil
2. Desain kegiatan model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar bagi peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan negara
3. Desain kegiatan model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar bagi peserta didik dengan sosial-ekonomi rendah
4. Desain kegiatan model kurikulum pendidikan layanan khusus pendidikan dasar bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar

## **IV. PELAKSANAAN**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rapat kerja dengan curah pendapat, diskusi fokus untuk mendapatkan kerangka kerja yang efektif.

## **V. JADWAL**

Kegiatan Penyusunan Desain Pengembangan Dan Ujicoba Model-model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus Dikdas Tanggal 19 s.d. 23 Februari 2007 di Puskur Jakarta

## **VI. DAFTAR ACARA**

**Uraian Kegiatan selama 5 hari adalah sebagai berikut.**

<b>Waktu</b>	<b>Acara</b>	<b>Pelaksana/ Moderator</b>
<b>Hari 1</b>		
09.00 – 09.30	Pembukaan oleh Kapuskur	Kapuskur
09.30 – 12.00	Penjelasan teknis dari Penanggung Jawab	Kabid
12.00 – 13.30	Isoma (Istirahat, sholat, makan)	
13.30 – 15.00	Membuat Desain Kegiatan (masing-masing koordinator)	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina

Waktu	Acara	Pelaksana/ Moderator
<b>Hari 2</b>		
09.00 – 12.00	Membuat Desain Kegiatan (masing-masing koordinator) - Lanjutan	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
12.00 – 13.30	Isoma (Istirahat, sholat, makan)	
13.30 – 15.00	Membuat Desain Kegiatan (masing-masing koordinator) - Lanjutan	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
<b>Hari 3</b>		
09.00 – 12.00	Presentasi desain	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
12.00 – 13.30	Isoma (Istirahat, sholat, makan)	
13.30 – 15.00	Presentasi desain - Lanjutan	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
<b>Hari 4</b>		
09.00 – 12.00	Diskusi desain dengan Kabid	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
12.00 – 13.30	Isoma (Istirahat, sholat, makan)	
13.30 – 15.00	Diskusi dan perbaikan desain	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
<b>Hari 5</b>		
09.00 – 12.00	Penyusunan Draft Desain	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
12.00 – 13.30	Isoma (Istirahat, sholat, makan)	
13.30 – 14.30	Penyusunan Laporan Kegiatan	Suci Paresti, Budiharta, Apriyanti, Erlina
14.30 – 15.00	Penutupan oleh Kapuskur	Kapuskur

## VII. DAFTAR BAHAN

Kegiatan ini menggunakan beberapa bahan antara lain: ATK (kertas dan alat tulis, map), berbagai dokumen referensi pendukung.

## VIII. DAFTAR PESERTA

Peserta Kegiatan Penyusunan Desain Pengembangan Dan Ujicoba Model-model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus Dikdas adalah sebagai berikut.

1. Dr. Herry Widyastono, M.Pd.	Puskur
2. Dra. Suci Paresti	Puskur
3. Budiharta, S.Sos	Puskur
4. Apriyanti, SE	Puskur
5. Erlina Indarti, S.Kom	Puskur
6. Dr. Djoko Marihandono	FBS UNJ
7. Dr. Suwirman Nuryadin, M.Pd.	UNJ
8. Dr. Supriyadi	UNJ
9. Prof. Dr. Ali Husein	UNJ
10. Endang Sri Rahayu	UNJ
11. Drs. H. Abdul Malik, MA.MM	Dit. Pembinaan TK/SD
12. Drs. Eko Tri Rahardjo, M.Pd.	FIS UNJ
13. Teguh Supriyadi, M.Si	Puslitjaknov Balitbang Jkt
14. Yanti Sri Yulianti	Perkumpulan Keluarga Peduli Pend.
15. Uken Kurniawati, S.Pd.	SDN Menteng 01 Jkt
16. Dra. Ages Soerjana	Bimbingan Remedial Terpadu Jkt
17. Lody Paat	FIP UNJ
18. Untung Sudrajat, S.Pd.	Ka SD Pantara Jkt
19. Yayah Komariah	Kom. Homeschooling Berkemas Jkt
20. Suyanto, S.Pd.	SMPN 49 Jkt
21. Drs. H.A. Riyanto, M.Ed.	Dit. Pembinaan SMP Jkt
22. Iman Prasetya A.	Ditwilhan Ditjen Strahan Dephan
23. Purnomo S. Akbar, M.Ed	Puslitjaknov Balitbang Jkt
24. Bagus Bagja, S.Pd.	SMP "Plus Hikmah"
25. Mujiana, S.Pd.	Waka SLB C Sumber Asih, Jkt
26. Siti Rahayu, S.Pd.	Ka SMPLB, SMALB Santi Rama Jkt
27. Yoga Firdaus	Pengawas SMA Dinas Dikmenti Jkt

28. Anton K Pengawas TK/SD Dinas Dikdas Jkt  
29. Drs. Deden Mulyadi Ka SLB D, D1 YPAC Jkt

## **IX. LAMPIRAN**

Hasil kegiatan, yaitu:

1. Desain Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus di Tingkat Pendidikan Dasar yang Tinggal di Daerah Terpencil.
2. Desain Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus di Tingkat Pendidikan Dasar yang Tinggal di Daerah Perbatasan.
3. Desain Pengembangan-Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus di Tingkat Pendidikan Dasar untuk social ekonomi rendah.
4. Desain Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus di Tingkat Pendidikan Dasar yang mengalami kesulitan belajar.

# LAMPIRAN

---

# **desain kegiatan**

---

**MODEL KURIKULUM LAYANAN KHUSUS  
BAGI PESERTA DIDIK YANG TINGGAL  
DI DAERAH TERPENDIL**

**PENDIDIKAN DASAR**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
TAHUN 2007**

# **DESAIN PENGEMBANGAN**

## **MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI TINGKAT PENDIDIKAN DASAR YANG TINGGAL DI DAERAH TERPENCIL**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **B. Latar Belakang**

Dalam catatan sejarah perjalanan bangsa, pendidikan nasional telah memberikan andil yang sangat besar. Indonesia sebagai bangsa yang besar dan sangat majemuk tidak akan sanggup melepaskan diri dari belenggu penjajahan tanpa keterlibatan dunia pendidikan. Sudah seyogyanya kalau pembangunan di sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam rangka menyambut dan mengantisipasi Era Globalisasi sekarang ini.

Salah satu kunci utama keberhasilan pendidikan adalah pembangunan kualitas SDM. Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan peningkatan sumber daya manusia yang andal.

Dengan demikian, tujuan pelaksanaan pembangunan nasional hendaknya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air atau di daerah terpencil, sebagaimana diamatkan dalam UUD 1945. Jika tujuan ini tercapai, maka tidak menimbulkan kesan diskriminatif, berpihak dan tidak adil. Sebab, setiap warga negara atau seluruh komponen masyarakat secara hukum telah dijamin memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Selain itu, pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil hendaknya dilandasi dengan dasar penegakan nasionalisme. Rasa kesatuan dan persatuan dalam rangka hidup berbangsa dan bernegara merupakan hal vital dan harus menjawab seluruh gerak dinamika pembangunan di Indonesia. Tanpa kesadaran akan pentingnya nasionalisme, maka seluruh program, tatanan, dan hasil-hasil pembangunan akan hancur. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil sudah selayaknya dilaksanakan dan dipandang sebagai wujud implementasi dari pemerataan hak dan kesempatan.

Berkenaan dengan itu, pemerintah telah melakukan dengan berbagai terobosan pengentasan kemiskinan dan kebodohan pada masyarakat di daerah terpencil, sehingga jurang ketertinggalan dengan masyarakat perkotaan tidak terlalu dalam dan segera dapat diantisipasi. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain program Gerakan Pemberantasan Buta Aksara dan Angka maupun Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 Tahun. Disamping itu, dalam hubungan dengan era otonomi daerah yang telah berjalan sejak tahun 2001, pemerintah telah menyerahkan hak dan kewenangan untuk melaksanakan pendidikan, bukan hanya ditingkat propinsi, melainkan sampai di tingkat Kabupaten/Kota.

Namun, apa yang telah diprogramkan pemerintah belum tersentuh secara optimal dan belum pula dapat mencapai hasil yang diharapkan. Telah disadari bersama, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah terpencil selama ini masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Keadaan geografis, jarak tempuh yang relatif jauh, dan sulitnya komunikasi merupakan beberapa kendala utama yang membuat daerah terpencil tetap terisolir, jauh dari sentuhan peradaban, dan cenderung bergerak lamban dalam mencapai kemajuan. Hingga sekarang, masyarakat di daerah-daerah terpencil belum dapat menikmati pendidikan yang layak, bermutu, dan merata. Kenikmatan hasil-hasil pembangunan, kemajuan ilmu dan teknologi, serta berbagai kemudahan lainnya sebagian besar masih diterima sebagai kabar dari negeri dongeng saja.

Pemerintah merasakan bahwa kondisi pendidikan negeri kita perlu terus dibenahi, dan tentunya diperlukan strategi yang tepat, terencana dan simultan. Maka, dalam rangka untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, pemerintah mencanangkan program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada tahun 2006. Sesuai dengan UU Sisdiknas, khususnya Pasal 31, PLK ini ditujukan bagi siswa-siswi yang berada di daerah pelosok, terpencil, komunitas adat terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam. Sasaran PLK ini adalah siswa-siswi usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Keunikan dari program ini, metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan dengan potensi anak didik dan daerahnya.

### C. Masalah

Ada beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil dalam rangka mencapai pendidikan yang layak dan bermutu :

#### 1. Sarana dan Prasarana

Pendirian gedung sekolah yang ada di desa-desa terpencil tidak selalu lengkap (misalnya hanya tiga unit ruang belajar), dan diperuntukkan bagi dua, tiga atau beberapa desa terdekat. Selain itu, kelengkapan perangkat pembelajaran (kurikulum, buku paket, alat peraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya) pun sangat jarang diperhatikan oleh pihak yang berwenang.

#### 2. Tenaga Pendidik

Rata-rata SD di daerah terpencil selalu kekurangan tenaga guru. Tidak sedikit sekolah-sekolah di daerah terpencil yang hanya terdiri dari seorang kepala sekolah dan seorang guru, yang umumnya memiliki tugas rangkap.

#### 3. Lingkungan

Kondisi lingkungan masyarakat di daerah terpencil kurang kondusif atau tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan masih rendah.

Karena keterbatasan di atas, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu model kurikulum yang dapat mengakomodasi keterbatasan peserta didik yang tinggal di daerah terpencil pada jenjang pendidikan dasar, sehingga mereka juga dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

#### **D. Tujuan**

Mengembangkan model-model kurikulum pendidikan layanan khusus di tingkat pendidikan dasar untuk peserta didik yang tinggal di daerah terpencil.

#### **E. Hasil yang Diharapkan**

Tersedianya Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus untuk peserta didik Sekolah Dasar yang tinggal di daerah terpencil.

## II. KERANGKA BERFIKIR

### A. Landasan Filosofis

#### 1. Hakekat Daerah Terpencil

Apabila seseorang menyebutkan "daerah terpencil" dengan seketika dalam benak pikiran yang muncul adalah segala sesuatu yang bersifat negatif atau dapat dikatakan kata tersebut cenderung memiliki konotasi negatif, yaitu miskin, terisolir, terbelakang, dan sebagainya. Kata "daerah terpencil" sudah cukup memberikan indikasi tentang "kebagaimanaan" kondisi daerah yang dimaksudkan serta keadaan riil tingkat kehidupan masyarakatnya.

Hampir seluruh masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil di Indonesia hingga saat ini masih jauh ketinggalan dalam kesempatan mengakses perkembangan ilmu dan teknologi maupun menikmati hasil-hasil pembangunan lainnya. Sebagaimana pendapat Prof HAR Tilaar (2004: 103) mengenai daerah terpencil dan daerah kepulauan yang sukar dicapai merupakan daerah-daerah yang relatif kurang efesien untuk pengembangan karena kendala komunikasi seakan-akan ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah perkotaan atau pedesaan lainnya yang lebih beruntung karena sarana komunikasinya yang sudah memadai.

Dengan demikian, melihat realitas kondisi masyarakat di daerah-daerah terpencil, juga sambil mengacu pada aturan-aturan (juridis-formal), bahwa pendidikan di daerah-daerah terpencil mutlak harus diberdayakan. Selama ini pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah terpencil masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Keadaan geografis, jarak tempuh yang relatif jauh, dan sulitnya komunikasi merupakan beberapa kendala utama yang membuat daerah terpencil tetap terisolir, jauh dari sentuhan peradaban, dan cenderung bergerak lamban dalam mencapai kemajuan. Hingga sekarang, masyarakat di daerah-daerah terpencil belum dapat menikmati pendidikan yang layak, bermutu, dan merata. Kenikmatan hasil-hasil pembangunan, kemajuan ilmu dan teknologi, serta berbagai kemudahan lainnya sebagian besar masih diterima sebagai kabar dari negeri dongeng saja.

Oleh karenanya, tujuan pelaksanaan pembangunan nasional hendaknya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara merata di seluruh pelosok tanah air. Apabila, tujuan ini tercapai maka tidak menimbulkan kesan diskriminatif, berpihak dan tidak adil. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara atau seluruh komponen masyarakat secara hukum memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil-hasil pembangunan, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

#### 2. Pemberdayaan (empowerment) Pendidikan di Daerah Terpencil

Pelaksanaan pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil merupakan sebagai wujud implementasi dari pemerataan hak dan kesempatan. Dengan

mengacu pada pemikiran dari HAR Tilaar, ada tiga aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebagai titik tolak pelaksanaan pemberdayaan (empowerment) pendidikan di daerah terpencil.

Pertama, pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil perlu dilakukan berdasarkan atas asas pemerataan pembangunan;

Kedua, pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil juga perlu dilakukan berdasarkan atas asas peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dimana ini sejalan dengan asas pertama. Jika tujuan ini tercapai, maka harkat dan martabat manusia Indonesia dengan sendirinya akan ikut terangkat. Kemudian pada akhirnya kelak tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang berada di bawah garis kemiskinan absolut (absolute poverty). Berdasarkan data dari United Nation Development Program (UNDP), kualitas SDM (Human Development Index) negara Indonesia tidak lagi berada pada peringkat ke-77 dari 130 negara ASEAN (UNDP, Human Development Report 1990), tetapi menjadi ke-109 dari 174 negara yang diteliti. (UNDP, Human Development Report 2000)

Ketiga, pelaksanaan pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil harus pula dilandasi dengan dasar penegakan nasionalisme. Dengan adanya kesadaran nasionalisme maka akan menjiwai gerak dinamika pembangunan bangsa.

### **3. Pendidikan Layanan Khusus di Daerah Terpencil**

Salah satu usaha penting untuk menumbuhkan hidup itu menjadi yang utuh dan sempurna ialah pendidikan. Hidup mulai tumbuh dari dalam keluarga, dikembangkan terus dengan bantuan pendidikan di sekolah. Melalui proses pendidikan itu kepribadian anak dimatangkan, pertumbuhan fisiknya dipelihara dan berbagai kemampuan dilatih dan dikembangkan, akhirnya seorang anak menjadi manusia dewasa yang utuh dan mandiri. Proses atau langkah pengembangan tersebut sangat diperlukan bagi anak, terutama bagi anak yang berada di pedalaman dan daerah terpencil.

Berkenaan dengan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan pada masyarakat di daerah terpencil. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain program Gerakan Pemberantasan Buta Aksara dan Angka maupun Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Namun, apa yang telah diprogramkan pemerintah tersebut belum tersentuh secara optimal dan belum pula dapat mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, pemerintah mengupayakan program lain yaitu mengembangkan sentra pendidikan layanan khusus yang diperuntukan terutama di wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil dan perbatasan. Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 2, bahwa Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah konflik dan tidak mampu dari segi ekonomi. Keunikan dari program ini,

metoda pengajarannya tidak melulu bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan life skill yang tentunya disesuaikan potensi anak didik.

Ada beberapa faktor yang menghambat keberlangsungan pendidikan layanan khusus bagi peserta didik yang tinggal di daerah terpencil, antara lain:

**a. Sarana dan Prasarana**

Idealnya setiap satu desa di daerah terpencil mendapatkan satu gedung sekolah (SD). Namun kenyataannya, pendirian gedung sekolah yang ada di desa-desa terpencil tidak selalu lengkap (misalnya hanya tiga unit ruang belajar), dan diperuntukkan bagi dua, tiga atau beberapa desa terdekat, bahkan banyak yang berstatus sebagai SD filial saja. Selain itu, kelengkapan perangkat pembelajaran (kurikulum, buku paket, alat peraga, dan alat-alat pembelajaran lainnya) pun sangat jarang diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang berwenang.

**b. Tenaga Pendidik**

Pada umumnya, SD di daerah terpencil selalu kekurangan tenaga guru. Sekolah-sekolah di daerah terpencil biasanya terdiri dari seorang kepala sekolah dan seorang guru, namun seringkali ada yang kepala sekolahnya sekaligus merangkap menjadi guru kelas, guru beberapa mata pelajaran, dan penjaga sekolah. Situasi dan kondisi ini membuat para tenaga pendidik (guru maupun kepala sekolah) tidak betah berlama-lama dalam menjalani masa tugasnya. Para guru di daerah terpencil umumnya mereka berasal dari daerah atau desa lain yang cukup jauh, baru satu atau dua tahun setelah pengangkatan mereka sudah mengajukan usul mutasi untuk pulang kampung atau minimal pindah tugas ke sekolah-sekolah lain di lingkungan perkotaan atau pinggiran kota. Terkait dengan persoalan tersebut, pihak-pihak yang berwenang hendaknya memikirkan strategi pemecahannya secara terprogram dan berkelanjutan, baik melalui program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

**c. Lingkungan**

Kondisi lingkungan masyarakat di daerah terpencil kurang kondusif. Pada umumnya, tingkat pendidikan dan kesadaran akan pentingnya pendidikan tergolong masih rendah. Keberadaan dan fungsi Komite Sekolah tidak dapat berjalan dengan baik. Demikian pula berbagai konsep baru mengenai pembaruan manajemen pendidikan, tingkat kemandiriannya masih sangat rendah. Akibatnya implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (School-Based Education) atau Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat (Community-Based Education) tidak dapat terlaksana dengan baik.

## B. Landasan Hukum

### 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31

- ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan

- ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5
- ayat (1) berbunyi: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”
  - ayat (3) dinyatakan: warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 2, dijelaskan pendidikan layanan khusus ialah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
4. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada
- Pasal 1, yang menyebutkan “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”
  - Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
  - Pasal 49, Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
  - Pasal 53, ayat 1, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  - Pasal 53, ayat 2, Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Pasal 19 Ayat 1 : Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik
  - Pasal 42, Ayat 1 : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6. UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen,

- Bab I, pasal 1, ayat 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  - Bab II, pasal 2, ayat 1: Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus.

### C. Landasan Empiris

### **III. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Ruang Lingkup Kegiatan mencakup:**

##### **1. Lingkup Jenis dan Jenjang Pendidikan:**

Di tingkat pendidikan dasar yang terdiri atas Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk peserta didik yang tinggal di daerah terpencil.

##### **2. Lingkup Mata Pelajaran:**

Meliputi semua mata pelajaran yang tercantum pada Standar Isi.

##### **3. Lingkup Pengembangan :**

Pada tahun anggaran 2007 ini, kegiatan pengembangan difokuskan pada model kurikulum pendidikan layanan khusus di tingkat pendidikan dasar yang tinggal di daerah terpencil.

##### **4. Lingkup Daerah Penelitian:**

Daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian untuk kepentingan need assessment satu daerah dalam Jawa dan empat daerah luar Jawa untuk kepentingan ujicoba.

#### **B. Unsur yang Terlibat**

Para ahli dan praktisi pendidikan yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain berasal dari unsur:

1. Perguruan Tinggi (Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, dan Universitas Pendidikan Indonesia)
2. Pendidik/Guru (Jakarta, Bandung)
3. LSM
4. Pusat Kurikulum
5. Unit Utama lain di Depdiknas

#### **C. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pengembangan Jaringan Kurikulum dan Sistem Monitoring dilakukan melalui serangkaian kegiatan, seperti: workshop, diskusi fokus, dan Lokakarya Koordinasi Jaringan Kurikulum.

#### **D. Metodologi**

Pada kegiatan ini menggunakan berbagai metodologi antara lain:

1. Diskusi Fokus

Diskusi Fokus digunakan pada saat penyusunan desain, pelaksanaan kajian konsep, kajian kebutuhan lapangan, dan penyusunan kerangka model serta penyusunan model pengembangan kurikulum. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh landasan teori yang sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Observasi dan Wawancara

Observasi digunakan pada pelaksanaan kegiatan kajian kebutuhan lapangan dan pelaksanaan ujicoba model. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung teori/konsep tentang pelayanan khusus dan kemungkinannya/kesesuaian untuk dapat diterapkan di lapangan. Adapun wawancara digunakan untuk mendapatkan data lebih detail dan jelas

3. Kuesioner dan Wawancara

Kuesioner digunakan pada pelaksanaan kegiatan kajian kebutuhan lapangan dan pelaksanaan ujicoba model. Data yang diperlukan bagi kegiatan ini adalah data tentang kebutuhan lapangan untuk penyusunan Model Kurikulum untuk Peserta Didik yang tinggal di daerah terpencil di Tingkat Pendidikan Dasar dan data tentang uji coba keterbacaan dan keterlaksanaan Model Kurikulum untuk Peserta Didik yang tinggal di daerah terpencil di Tingkat Pendidikan Dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data empiris dari lapangan dan diperkuat dengan wawancara.

4. Pengolahan data

Data yang diperoleh dianalisis agar informasi yang diperlukan dapat digali dari pengumpulan datanya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif deskriptif, perhitungan secara kuantitatif (seperti persentasi) masih dimungkinkan. Data berupa bilangan digunakan untuk menghitung persentasi untuk menetapkan kecenderungan jawaban responden. Data berupa hasil pengamatan dikategorisasikan sebelum ditafsirkan lebih lanjut. Data berupa hasil wawancara juga dikategorisasikan sebelum akhirnya diotafsirkan dan disusun kesimpulannya.

5. Rapat Kerja (Workshop)

Rapat Kerja (Workshop) dilakukan pada kegiatan penyusunan kerangka model, penyusunan model, pelaksanaan ujicoba model, perbaikan model, penyempurnaan model dan penyusunan laporan. Pada kegiatan-kegiatan tsb diatas akan menghasilkan model pengembangan kurikulum pendidikan layanan khusus yang tinggal di daerah terpencil.

## E. Tahapan Kerja

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

No.	Langkah/Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Pelaksanaan Kegiatan/Acara

No.	Langkah/Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Pelaksanaan Kegiatan/Acara
1	Penyusunan desain	Menyusun desain	Desain Model	Rapat Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarahan dari Pimpinan/Pngjwb</li> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Diskusi</li> </ul> Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
2	Kajian konsep	Mengkaji konsep	Konsep Pengembangan Model	Workshop <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengarahan dari Pimpinan/Pngjwb</li> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Kegiatan inti (penyusunan instrumen)</li> <li>• Perumusan konsep-konsep oleh Tim</li> </ul> Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
3	Kajian kebutuhan lapangan	Mengetahui kebutuhan lapangan	Identifikasi kebutuhan lapangan	Kegiatan Ujicoba (2 daerah di dalam Jawa dan 1 daerah di luar Jawa) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permohonan Ijin ke Dinas Pendidikan Prop/kota/kab</li> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Kegiatan identifikasi kebutuhan lapangan</li> </ul>
4	Penyusunan kerangka model	Membuat kerangka model	Draft Model	Rapat Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Kegiatan Inti</li> </ul> Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
5	Penyusunan model	Model	Model yang akan diujicoba	Rapat Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan kegiatan dari</li> </ul>

No.	Langkah/Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Pelaksanaan Kegiatan/Acara
				koordinator • Kegiatan Inti Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
6	Pelaksanaan Ujicoba Model	Mendapatkan masukan dari lapangan	Masukan/data dari lapangan	Kegiatan Ujicoba (2 daerah di dalam Jawa dan 2 daerah di luar Jawa) • Permohonan Ijin ke Dinas Pendidikan Prop/kota/kab • Penjelasan kegiatan dari koordinator • Kegiatan ujicoba
7	Analisis hasil ujicoba	Menganalisis hasil ujicoba	Hasil analisis ujicoba	Rapat Kerja • Penjelasan kegiatan dari koordinator • Kegiatan Inti Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
8	Perbaikan model	Memperbaiki model berdasarkan hasil ujicoba	Model yang sudah diperbaiki	Rapat Kerja • Penjelasan kegiatan dari koordinator • Kegiatan Inti • Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya
9	Presentasi model	Mempresentasikan model	Masukan untuk perbaikan model	Workshop • Pengarahan dari Pimpinan/Pngjwb • Penjelasan kegiatan dari koordinator • Kegiatan inti Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya

No.	Langkah/Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Diharapkan	Pelaksanaan Kegiatan/Acara
10	Penyempurnaan model	Menghasilkan model (akhir)	Model akhir	Rapat Kerja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Kegiatan Inti</li> <li>• Kegiatan ditindaklanjuti pada kegiatan berikutnya</li> </ul>
11	Penyusunan laporan	Membuat Laporan Kegiatan	Laporan Akhir	Raker <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjelasan kegiatan dari koordinator</li> <li>• Kegiatan inti</li> <li>• Pengumpulan laporan akhir</li> </ul>

#### F. Jadwal Kerja

Agar tim kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan memberi hasil sesuai dengan harapan, perlu disiapkan jadwal kerja yang sistematis dan memiliki kemudahan untuk dilaksanakan. Jadwal kerja tersebut sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi tenaga, dana dan kelangkapan lainnya bagi kegiatan ini. Adapun jadwal yang telah disiapkan yakni:

No	Kegiatan	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sep				Okt			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan desain																																				
2	Kajian konsep																																				
3	Kajian kebutuhan lapangan																																				
4	Penyusunan kerangka model																																				
5	Penyusunan model																																				
6	Ujicoba																																				
7	Analisis hasil ujicoba																																				
8	Perbaikan model																																				
9	Presentasi model																																				
10	Penyempurnaan model																																				
11	Penyusunan laporan																																				

# **desain kegiatan**

---

**MODEL KURIKULUM LAYANAN KHUSUS  
BAGI PESERTA DIDIK YANG TINGGAL  
DI DAERAH PERBATASAN**

**PENDIDIKAN DASAR**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
TAHUN 2007**

## DESAIN

### MODEL KURIKULUM UNTUK PESERTA DIDIK YANG TINGGAL DI DAERAH PERBATASAN

#### a. Latar belakang

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender. Pasal 28 b, Ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 31 (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan antaralain:

- 1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa;
- 2) Satu kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan multmakna;
- 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
- 4) Mengembangkan budaya membaca dan menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Di era otonomi dan desentralisasi sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan berbagai perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka

mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis, yang memberi perhatian pada keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat, tanpa kehilangan wawasan pendidikan.

Sejalan dengan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, berbagai program telah dicanangkan. Program-program dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kecukupan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, meningkatkan kemampuan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dan pembelajaran pada satuan pendidikan, membina dan mengembangkan karir, serta meningkatkan kesejahteraan penghargaan dan perlindungan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta pengelolaan yang akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum. Pengembangan model-model kurikulum ini termasuk di dalamnya adalah untuk pendidikan layanan khusus. Peserta didik yang mendapatkan layanan khusus ini adalah peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi", termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan langsung antar negara.

Berbagai kelemahan dan kendala mutu pendidikan di Perbatasan Negara Republik Indonesia, salah satunya adalah terjadi kesenjangan, baik aspek infrastruktur, sosial, khususnya pendidikan.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang demikian Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas akan mengadakan kegiatan untuk membuat suatu model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan antar negara.

## b. Tujuan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan peran serta Stake Holder di daerah perbatasan negara dalam peningkatan mutu pendidikan dan mutu pembelajaran sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional.

Secara khusus kegiatan ini bertujuan:

- 1) Mengembangkan model-model kurikulum pendidikan layanan khusus di tingkat pendidikan dasar untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan.
- 2) Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi melalui saling berbagai pengalaman dan belajar dari praktik model-model pembelajaran yang sudah diterapkan di sekolah percontohan.
- 4) Mengembangkan motivasi internal dan eksternal bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perbatasan negara agar menjadi pelaku-pelaku yang kreatif, inovatif, dan cendikia.

**c. Ruang lingkup**

Lingkup dalam kegiatan ini adalah mencari perihal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan proses belajar mengajar untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan. Perbatasan yang dimaksud di sini adalah perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara-negara lain. Lingkup pendidikan yang akan dijadikan model adalah pendidikan dasar dalam hal ini khusus untuk sekolah dasar.

**d. Hasil yang diharapkan**

Dalam kegiatan ini diharapkan dapat tersusun model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan jenjang pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar.

**e. Metodologi kegiatan**

Metode dalam kegiatan ini dirangkang dengan melakukan berbagai langkah kegiatan, yaitu:

**1. Studi pendahuluan**

Dalam langkah ini diharapkan masukan-masukan dari ahli, praktisi pendidikan, guru, dan nara sumber lainnya untuk melengkapi teori-teori yang relevan dengan kegiatan dimaksud.

Mengkaji berbagai informasi dan permasalahan peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan antar negara, kriteria-kriteria yang digunakan untuk

mengklasifikasikan peserta didik dalam kelompok ini, dan pengaruh dari negara lain terhadap problematika pendidikan

## 2. Kajian kebutuhan lapangan dan ujicoba

Kajian kebutuhan lapangan dilakukan di daerah perbatasan, guna memperoleh gambaran permasalahan yang terjadi di daerah tersebut.

Dalam melakukan kegiatan ini tidak terlupakan dari keperluan akan penyediaan instrumen pengumpulan data. Data yang diperlukan bagi kegiatan ini adalah data tentang kebutuhan lapangan untuk penyusunan Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di perbatasan di tingkat Sekolah Dasar dan data tentang uji coba keterbacaan dan keterlaksanaan model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di perbatasan di Tingkat Sekolah Dasar. Oleh karena itu, pada kegiatan ini harus disiapkan dua jenis instrumen yang berbeda peruntukannya.

Instrumen yang harus disiapkan untuk kedua jenis data adalah Instrumen Observasi tentang kondisi lapangan, Pedoman wawancara Guru, daftar cek dan pedoman Observasi. Sebelum instrumen dapat dihasilkan, langkah yang dilakukan adalah menyusun kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Selanjutnya berdasarkan kisi-kisi, disusun sejumlah instrumen sesuai dengan jenis pengumpulan data yang akan dilakukan.

## 3. Pengolahan data

Data yang diperoleh harus dianalisis agar informasi yang diperlukan dapat digali dari pengumpulan datanya. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif.

Dalam analisis kualitatif deskriptif, perhitungan secara kuantitatif (seperti persentasi) masih dimungkinkan. Data berupa bilangan digunakan untuk menghitung persentasi untuk menetapkan kecenderungan jawaban responden. Data berupa hasil pengamatan dikategorisasikan sebelum ditafsirkan lebih lanjut. Data berupa hasil wawancara juga dikategorisasikan sebelum akhirnya ditafsirkan dan disusun kesimpulannya.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan digunakan berbagai strategi antara lain:

1. Mengkaji berbagai informasi dan permasalahan peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan antar negara, kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan peserta didik dalam kelompok ini, dan pengaruh dari negara lain terhadap problematika pendidikan.

2. Melakukan workshop yang melibatkan ahli dari perguruan tinggi, guru di lapangan, dan direktorat terkait.
3. Melakukan kajian kebutuhan lapangan di satu daerah/Sekolah Dasar yang dapat dijadikan dasar penyusunan Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan.
4. Menyusun dan menetapkan kriteria Pedoman Penulisan Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan.
5. Membentuk tim kerja yang utuh dan bekerja secara sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai unsur antara lain ahli dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lapangan, maupun direktorat pembina di lingkungan Depdiknas.
6. Melakukan seluruh rangkaian kegiatan secara teratur dan taat terhadap perencanaan yang telah disusun

**f. Unsur yang terlibat**

Dalam kegiatan ini perlu melibatkan para ahli dari perguruan tinggi, Hankam, guru, direktorat terkait, dan lembaga swadaya masyarakat.

**g. Langkah kegiatan**

1. Penyusunan desain

Tujuan kegiatan ini adalah menyusun desain yang akan digunakan sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Kajian konsep

Tujuan langkah kegiatan ini adalah melakukan pengkajian konsep-konsep dari berbagai sumber, masukan para ahli, dan sumber lain yang relevan.

3. Kajian kebutuhan lapangan

Melakukan kajian lapangan di satu daerah/Sekolah Dasar yang dapat dijadikan dasar penyusunan Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan

4. Penyusunan kerangka model

Tahap ini diharapkan tersusunnya kerangka model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di perbatasan berdasarkan kajian kebutuhan lapangan.

5. Penyempurnaan model

Pada langkah ini diharapkan sudah tersusun suatu model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di perbatasan yang siap diujicobakan.

6. Ujicoba lapangan

Tahap ujicoba lapangan bertujuan untuk memperoleh masukan-masukan dari lapangan berkaitan dengan ketebacaan, kesesuaian dan keterlaksanaan dari model tersebut.

7. Analisis hasil ujicoba

Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis hasil ujicoba lapangan.

8. Perbaikan model

Langkah kegiatan ini adalah melakukan perbaikan model berdasarkan analisis lapangan.

9. Presentasi model

Model yang sudah tersusun kemudian dipresentasikan guna mendapatkan masukan-masukan dari pimpinan Puskur, ahli dan praktisi pendidikan.

10. Penyempurnaan model

Langkah penyempurnaan model ini dilakukan berdasarkan masukan-masukan dari pimpinan Puskur, ahli dan praktisi pendidikan.

11. Penyusunan laporan

Menyusun laporan akhir kegiatan penyusunan model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan.

#### **h. Jadwal Kerja**

Agar tim kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan memberi hasil sesuai dengan harapan, perlu disiapkan jadwal kerja yang sistematis dan memiliki kemudahan untuk dilaksanakan. Jadwal kerja tersebut sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi tenaga, dana dan kelangkapan lainnya bagi kegiatan ini. Adapun jadwal yang telah disiapkan yakni:

No	Kegiatan	Feb			Mar			Apr			Mei			Jun			Jul			Agt			Sep			Okt			Nov			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	Penyusunan desain																															
2	Kajian konsep																															
3	Kajian kebutuhan lapangan																															
4	Penyusunan kerangka model																															
5	Penyusunan model																															
6	Ujicoba																															
7	Analisis hasil ujicoba																															
8	Perbaikan model																															
9	Presentasi model																															
10	Penyempurnaan model																															
11	Penyusunan laporan																															

# **desain kegiatan**

---

**MODEL KURIKULUM LAYANAN KHUSUS  
BAGI PESERTA DIDIK DENGAN KEADAAN  
SOSIAL EKONOMI RENDAH**

**PENDIDIKAN DASAR**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
TAHUN 2007**

# **DESAIN PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR – MODEL KURIKULUM UNTUK PESERTA DIDIK SOSIAL-EKONOMI RENDAH**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut data Susenas 2004, rata-rata APK (Angka Partisipasi Kasar) pada jenjang SMP/MTs di wilayah perkotaan sudah mencapai 91.43% sementara di pedesaan baru mencapai 75.89%. Demikian pula kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan kaya juga sangat menonjol. Pada jenjang SMP/MTs APK kelompok masyarakat miskin baru mencapai 63.82%, sedangkan kelompok masyarakat kaya telah mencapai 97.16%.

Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun model kurikulum untuk social ekonomi rendah pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah adanya opportunity cost, mengingat mereka yang telah menamatkan SMP/MTs pada umumnya berusia 15 tahun keatas, sehingga dorongan untuk memasuki pasar kerja lebih awal cukup tinggi, terlebih lagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Dengan alasan ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga mereka lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2006 pemerintah akan melakukan susenas, sebelum melakukan sensus tersebut, pemerintah telah memperkirakan jumlah penduduk miskin sekitar 17% dari seluruh penduduk Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, menyebabkan semakin tingginya anak putus sekolah, karena mereka harus mengutamakan bekerja untuk membantu keluarganya. Pendidikan menjadi tidak penting menurut kelompok masyarakat ini.

Pemerintah telah menggulirkan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk memperluas kesempatan setiap anak yang memasuki usia sekolah mendapatkan pendidikan hingga jenjang pendidikan (SD dan SMP) secara gratis. Tetapi kebijakan ini pun tidak dapat menjaring seluruh anak usia sekolah untuk bersekolah karena meskipun biaya pendidikan gratis, mereka tetap harus menanggung biaya lain seperti transportasi dari rumah ke sekolah (PP), uang jajan, buku pelajaran, dan lain-lain, yang jumlahnya juga tidak sedikit, sedangkan sebagian besar dari mereka berasal dari sosial ekonomi rendah.

Hal di atas merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah, karena pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pendidikan merupakan landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang dikarenakan sosial ekonomi rendah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang utamanya adalah melakukan kajian konsep tentang pendidikan layanan khusus. Kajian ini melibatkan para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam mengupas berbagai persoalan pendidikan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut. Kajian ini juga melibatkan para pakar dan praktisi berbagai keahlian untuk mencari bentuk-bentuk atau model-model kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan persoalan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dalam proses pengembangan model kurikulum layanan khusus ini diperlukan kajian yang cermat dan tepat sasaran, sehingga untuk kebutuhan validitas data dan model yang dihasilkan, para pengembang kurikulum ini harus tinggal/menenetap di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

### **B. Masalah**

Ada beberapa faktor yang menghambat peserta didik dari sosial ekonomi rendah untuk bersekolah:

1. Waktu, sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membantu orang tua mencari nafkah.
2. Tempat belajar, ada kecenderungan sekolah (formal) untuk tidak memberikan kesempatan kepada anak dari kalangan social-ekonomi rendah untuk bersekolah di sekolah tersebut.
3. Kecenderungan sikap guru yang diskriminatif (membedakan pelayanan kepada anak didik berdasarkan status orang tua mereka)
4. Sarana belajar yang mereka miliki terbatas, seperti buku-buku pelajaran.
5. Biaya transportasi yang jumlahnya tidak sedikit yang harus mereka keluarkan untuk ke sekolah.
6. Faktor psikologis, seperti rendah diri, sulit untuk berkonsentrasi pada pelajaran, kurangnya dukungan orang tua untuk bersekolah.

Karena keterbatasan di atas, maka perlu dipertimbangkan untuk membuat suatu model kurikulum yang dapat mengakomodasi keterbatasan peserta didik dari sosial ekonomi rendah pada jenjang pendidikan dasar, sehingga mereka juga dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas.

### **C. Tujuan**

Mengembangkan model-model kurikulum pendidikan layanan khusus di tingkat Sekolah Menengah Pertama untuk peserta didik sosial ekonomi rendah

### **D. Hasil yang Diharapkan**

Adanya model kurikulum untuk peserta didik sosial ekonomi rendah di tingkat Sekolah Menengah Pertama

## BAB II KERANGKA BERFIKIR

### A. LANDASAN FILOSOFIS

Kemiskinan (ekonomi rendah) terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state* yang telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas karena mereka dituntut untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Kemiskinan juga menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, *safety life* (James, C. Scott, 1981), seperti mengorbankan anak-anaknya untuk bekerja.

Sedangkan berbagai studi menunjukkan pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (*critical mass*), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan.

### B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat (1) yang berbunyi:  
“Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”
2. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 31 ayat (2) yang berbunyi:  
“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:  
“setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.
4. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 32 ayat (2) yang berbunyi:  
“Pendidikan layanan khusus ialah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi”
5. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49 yang berbunyi:  
“Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”

### C. LANDASAN EMPIRIS

1. Suara Masyarakat Miskin berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Nyoman Oka dan Ratna Indrawati Josodipoero, Ketua Tim; Wiji J. Santoso, Idul Fitriatun, Ketut Suarken, Nur Khamid (Tim Jawa Timur); Purnama Sidi, Laksmini Sita, Herry Septiadi, Ririn Fajri (Tim Jawa Barat); Titik Soeprijati, Irwan, Mochamad Rifai, Ariatim (Tim Nusa Tenggara Barat); Husnuzzoni, Khusairi, Nazmi Rakhman, Indraningsih (Tim Kalimantan Selatan). Penelitian lapangan ini dianalisis dan didukung oleh Indonesia Poverty Analysis Program (INDOPOV), sebuah program

kemitraan Bank Dunia Indonesia yang dipimpin Jehan Arulpragasan. Beberapa temuan dalam penelitian ini:

- **Sekolah Dasar: Tidak Sepenuhnya Gratis – Walaupun Ada Bantuan Pemerintah**

Kurangnya pendidikan merupakan fakta adanya masyarakat miskin di Indonesia. Enam dari delapan lokasi, masyarakat miskin mempunyai karakteristik kemiskinan sebagai: "Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin sering tidak terdaftar di sekolah dasar/tidak menyelesaikan sekolah dasar/hanya berhasil menyelesaikan sekolah dasar." Di bulan Juli 2005, pemerintah Indonesia berjanji untuk menyediakan pendidikan dasar sembilan tahun untuk semua anak-anak usia sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun demikian, masyarakat miskin tetap harus membayar uang pangkal sekolah yang besar (kadang disebut sebagai biaya gedung), terutama di Jawa.

- **Beban Biaya Tambahan**

Masyarakat miskin merasa dibebani oleh biaya sekolah, ("Mengapa buku harus diganti setiap semester?"), ("Mengapa tidak menggunakan buku yang bisa dipakai sepanjang tahun?"), ("Mengapa buku sekolah harganya mahal?"), ("Mengapa kami dikenakan biaya untuk ijazah?") adalah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan. Biaya masuk dan ijazah yang belum dibayar menumpuk. Ijazah yang ditahan oleh sekolah menjadi beban tambahan bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Hal ini lalu menimbulkan kekecewaan dan pertentangan di antara para orang tua dan pengelola sekolah. Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan beban utama secara finansial bagi keluarga miskin. Rumah tangga miskin berusaha untuk mengirim setidaknya satu anak ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) — namun jarang bisa menanggung biaya untuk menyekolahkan semua anak.

- **Sekolah Umum Paling Populer, tetapi Sekolah Islam juga Penting**

Pesantren atau sekolah Islam lainnya (Madrasah Tsanawiyah) lebih banyak dipilih dibanding SMP, oleh 37 persen laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, dan merupakan pilihan populer di dua lokasi, Alas Kokon dan Antasari (lihat Lampiran 3, Gambar 3.3). Kertajaya dan Bajo Pulau tidak memiliki sekolah menengah pertama dan sisanya, empat lokasi memilih SMP yang ada di daerah tersebut.

- **Kurangnya Sekolah Menengah Berarti Anak-anak Perempuan Harus Menikah**

Kehidupan anak perempuan berubah drastis jika sekolah menengah tidak dapat dijangkau, baik karena jarak yang jauh maupun karena biaya. Dalam keadaan demikian, anak perempuan akan segera menikah setelah lulus sekolah dasar dan hamil pada saat mereka baru saja memasuki masa puber.

- **Lain-lain**

- a) Ketidakhadiran guru merupakan masalah utama di daerah pedesaan yang kekurangan air bersih dan sanitasi. Ini merupakan salah satu sebab guru dari

daerah perkotaan tidak bersedia tinggal di desa. Bila mereka tidak hadir, anak-anak dibiarkan keluar sekolah, tinggal di dalam kelas tanpa guru, atau diajar oleh guru pengganti yang tidak terlatih dengan metode mengajar yang sangat buruk, dan tingkat pengetahuan yang tidak lebih dari lulusan sekolah menengah.

- b) Mutu infrastruktur dan pendidikan, sebagaimana mutu pengajaran pada sekolah menengah, jauh lebih baik dibandingkan pada sekolah dasar. Namun hal ini memberi sedikit perbedaan bagi masyarakat miskin, karena menurut penelitian, anak dari keluarga miskin jarang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah dasar.

2. SMP Terbuka merupakan salah satu pelayanan khusus terhadap kelompok masyarakat ini (sosio-ekonomi rendah). SMP Terbuka adalah salah satu subsistem pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara madiri, yaitu belajar dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain dengan waktu dan tempat belajar lebih terbuka dan fleksibel disesuaikan dengan kondisi siswa.

Tujuan diadakannya SMP terbuka adalah memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada anak-anak SD/MI atau yang setara yang berniat melanjutkan, tetapi tidak dapat mengikuti pendidikan di SMP Reguler karena kondisi sosial ekonomi atau geografi. Siswa SMP Terbuka belajar menggunakan bahan cetak berupa modul yang dibagikan secara gratis di TKB (Tempat Kegiatan Belajar) dan dibimbing oleh guru pamong serta guru bina dari sekolah induk. Lulusan SMP Terbuka dihargai sama dengan lulusan SMP Reguler, dan menerima Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMP, ini berarti bahwa lulusan SMP Terbuka mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan lulusan SMP Reguler.

3. Alternatif lain pelayanan kepada peserta didik sosial-ekonomi rendah adalah dengan penyelenggaraan pendidikan melalui jalur nonformal, yaitu Paket B (setara SMP).

### **BAB III METODE**

#### **A. Strategi**

Untuk mencapai hasil yang diharapkan digunakan berbagai strategi antara lain:

1. Mengkaji berbagai informasi tentang sosial ekonomi rendah, kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan peserta didik dalam kelompok ini, dan pengaruh dari sosial ekonomi rendah terhadap pendidikan.
2. Melakukan workshop yang melibatkan ahli dari perguruan tinggi, guru di lapangan, dan direktorat terkait.
3. Melakukan kajian kebutuhan lapangan di satu daerah/Sekolah Menengah Pertama yang dapat dijadikan dasar penyusunan Model Kurikulum untuk Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
4. Menyusun dan menetapkan kriteria Pedoman Penulisan Model Kurikulum untuk Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama.
5. Membentuk tim kerja yang utuh dan bekerja secara sungguh-sungguh dengan melibatkan berbagai unsur antara lain ahli dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lapangan, maupun direktorat pembina di lingkungan Depdiknas.
6. Melakukan seluruh rangkaian kegiatan secara teratur dan taat terhadap perencanaan yang telah disusun

#### **B. Tahapan Kerja**

No.	Langkah/Kegiatan	Tujuan
1	Penyusunan desain	Menyusun desain
2	Kajian konsep	Mengkaji konsep
3	Kajian kebutuhan lapangan	Mengetahui kebutuhan lapangan
4	Penyusunan kerangka model	Membuat kerangka model
5	Penyusunan model	Model
6	Pelaksanaan Ujicoba Model	Mendapatkan masukan dari lapangan
7	Analisis hasil ujicoba	Menganalisis hasil ujicoba
8	Perbaikan model	Memperbaiki model berdasarkan hasil ujicoba
9	Presentasi model	Mempresentasikan model
10	Penyempurnaan model	Menghasilkan model (akhir)
11	Penyusunan laporan	Membuat Laporan Kegiatan

#### **C. Metodologi**

##### **1. Kajian Kebutuhan Lapangan**

Kajian kebutuhan lapangan dilakukan di satu Sekolah Menengah Pertama di satu daerah di Jawa, dan selama melakukan observasi dilakukan berdasarkan instrumen observasi yang telah disusun sebelumnya.

## **2. Instrumen**

Kegiatan studi dan pengembangan ini tidak terlupakan dari keperluan akan penyediaan instrumen pengumpulan data. Data yang diperlukan bagi kegiatan ini adalah data tentang kebutuhan lapangan untuk penyusunan Model Kurikulum untuk Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama dan data tentang uji coba keterbacaan dan keterlaksanaan Model Kurikulum untuk Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu, pada kegiatan ini harus disiapkan dua jenis instrumen yang berbeda peruntukannya.

Instrumen yang harus disiapkan untuk kedua jenis data adalah Instrumen Observasi tentang kondisi lapangan, Pedoman wawancara Guru, daftar cek dan pedoman Observasi. Sebelum instrumen dapat dihasilkan, langkah yang dilakukan adalah menyusun kisi-kisi instrumen terlebih dahulu. Selanjutnya berdasarkan kisi-kisi, disusun sejumlah instrumen sesuai dengan jenis pengumpulan data yang akan dilakukan.

## **3. Pengolahan data**

Data yang diperoleh harus dianalisis agar informasi yang diperlukan dapat digali dari pengumpulan datanya. Analisis dilakukan secara diskriptif kualitatif. Dalam analisis kualitatif deskriptif, perhitungan secara kuantitatif (seperti persentasi) masih dimungkinkan. Data berupa bilangan digunakan untuk menghitung persentasi untuk menetapkan kecenderungan jawaban responden. Data berupa hasil pengamatan dikategorisasikan sebelum ditafsirkan lebih lanjut. Data berupa hasil wawancara juga dikategori-sasikan sebelum akhirnya diotafsirkan dan disusun kesimpulannya.

#### 4. Jadwal Kerja

Agar tim kerja dapat melaksanakan tugasnya dengan memberi hasil sesuai dengan harapan, perlu disiapkan jadwal kerja yang sistematis dan memiliki kemudahan untuk dilaksanakan. Jadwal kerja tersebut sifatnya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi tenaga, dana dan kelangkapan lainnya bagi kegiatan ini. Adapun jadwal yang telah disiapkan yakni:

# **desain kegiatan**

---

**MODEL KURIKULUM LAYANAN KHUSUS  
BAGI PESERTA DIDIK YANG MENGALAMI  
KESULITAN BELAJAR**

**PENDIDIKAN DASAR**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PUSAT KURIKULUM  
TAHUN 2007**

**DESAIN**  
**Model Kurikulum Untuk Peserta Didik**  
**Yang Mengalami Kesulitan Belajar**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Amandemen Undang-undang 1945 pasal 31:  
(ayat 1), setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,  
(ayat 2), warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

UU RI No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi "setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu".

Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar merupakan peserta didik yang memerlukan perhatian khusus. Mereka sebenarnya memiliki kecerdasan normal bahkan ada yang di atas rata-rata. Di sekolah reguler, anak yang berkesulitan belajar umumnya tidak terdeteksi secara baik oleh guru. Mereka biasanya memiliki prestasi belajar di bawah rata-rata kemampuan yang diharapkan. Sehingga mereka dianggap sebagai anak yang kurang pandai.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa gangguan yang bersifat neurologis, gangguan panca indra (misalnya gangguan penglihatan ringan), cacat fisik, dan gangguan psikologis.

Sedangkan untuk faktor eksternal bisa berupa keadaan keluarga, sarana dan prasarana sekolah, serta kondisi sosial masyarakat.

Apabila hal tersebut tidak ditangani dengan segera, maka lama kelamaan akan menyebabkan peserta didik malas untuk pergi ke sekolah dan yang terburuk adalah dapat mengakibatkan peserta didik mengulang kelas. Untuk itu perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah untuk membantu anak yang mengalami kesulitan belajar.

## **B. Permasalahan**

Anak yang mengalami kesulitan belajar umumnya tidak mendapat perhatian khusus dari guru. Mereka hanya dianggap sebagai anak dengan prestasi belajar yang di bawah rata-rata dari kemampuan yang diharapkan. Padahal Anak berkesulitan belajar sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan normal bahkan ada yang berada di atas rata-rata, akan tetapi prestasi belajar mereka rendah.

## **C. Tujuan**

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di tingkat pendidikan dasar sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki.

## **D. Hasil Yang Diharapkan**

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan model kurikulum bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar sehingga mereka mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

## **E. Ruang Lingkup**

Model kurikulum yang akan dikembangkan yaitu pada:

1. Jenjang Pendidikan Dasar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD).
2. Kelas 1 s/d 3 SD (kelas awal).
3. Difokuskan pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akademik, yaitu kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), dan kesulitan belajar berhitung (diskalkulia).

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Menurut Lynch dan Lewis (1988), Anak dengan Kebutuhan Pendidikan Khusus dikelompokkan menjadi **anak berkesulitan belajar**, gangguan wicara, retardasi mental, gangguan emosi, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan tuna ganda.

Sedangkan menurut Ashman dan Elkins (1994), yang termasuk ke dalam Anak dengan kebutuhan pendidikan khusus yaitu anak berbakat, gangguan komunikasi, **berkesulitan belajar**, gangguan emosi dan perilaku, gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, dan gangguan fisik.

Berdasarkan kebijakan pendidikan di Indonesia, jenis anak dengan kebutuhan pendidikan khusus dikelompokkan menjadi anak berkelainan fisik dan/atau mental, anak yang mempunyai kemampuan dan kecerdasan luar biasa, dan **anak yang berkesulitan belajar**.

Menurut The National Joint Committee Learning Disabilities, "Kesulitan Belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang matematika. Gangguan tersebut instrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem syaraf pusat. Meskipun, suatu kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu (misalnya gangguan sensoris, tuna grahita, hambatan sosial dan emosional) atau berbagai pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya, pembelajaran yang tidak tepat, berbagai faktor psikogenik), berbagai hambatan tersebut bukan penyebab utama atau pengaruh langsung".

Anak yang berkesulitan belajar adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, baik disebabkan karena adanya

disfungsi neurologis, psikologis, maupun sebab-sebab lain sehingga prestasi belajarnya rendah dan anak tersebut beresiko tinggi tinggal kelas.

Anak yang mengalami kesulitan belajar dikelompokkan menjadi dua, yaitu kesulitan belajar umum yang ditunjukkan dengan prestasi belajar rendah untuk hampir semua mata pelajaran dan **kesulitan belajar khusus** ditunjukkan dengan prestasi belajar rendah untuk mata pelajaran tertentu (bahasa dan atau matematika).

Secara umum kesulitan belajar khusus dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kesulitan belajar pra akademik (gangguan perkembangan motorik dan persepsi, kesulitan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa, dan kesulitan penyesuaian sosial), dan **kesulitan belajar akademik** (kesulitan belajar membaca (disleksia), menulis (disgrafia), berhitung dan matematika (diskalkulia)).

**Kesulitan membaca** ditandai dengan tingkah laku anak yang membaca lambat kata demi kata, sulit membedakan huruf tertentu (misal huruf b dan d), sering mengulangi atau menebak kata/frase, membaca tanpa irama (monoton), cenderung mengikuti tulisan yang hendak dibaca dengan menggunakan jari,.

Rendahnya kemampuan aritmatika atau keterampilan matematika menjadi ciri umum dari **kesulitan berhitung**, seperti kesulitan dalam mempelajari nama angka, mengikuti alur hitungan, kurang memahami operasi tambah/kurang, salah hitung dan selalu membuat kesalahan pada hitungan yang sama, serta kesulitan memahami simbol matematika.

Sedangkan untuk **kesulitan menulis** ditandai oleh ketidakmampuan membuat suatu komposisi tulisan dalam bentuk teks, seperti kesalahan dalam mengeja kata, tata bahasa, tanda baca, pemakaian huruf kapital tulisan terlalu jelek atau tidak terbaca, dan sering terlambat selesai dalam menyalin tulisan, tulisan banyak salah, banyak huruf terbalik atau hilang, sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. Kelainan ini bisa disebabkan gangguan konsentrasi dan pemusatan perhatian, memori visual, dan koordinasi motorik halus.

Dalam menangani masalah kesulitan belajar ini, perlu adanya kerjasama antara sekolah dalam hal ini guru, orang tua, serta peserta didik itu sendiri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya penanganan kesulitan belajar dikarenakan kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengenali peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi bagi peserta didik yang berguna untuk membantu dalam menangani peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar serta untuk menentukan metode pembelajaran yang tepat untuk peserta didik tersebut.

### BAB III

#### METODOLOGI

##### A. Strategi

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan perlu kiranya perencanaan atau strategi kerja yang baik. Tahapan kerja pada kegiatan ini yaitu:

- Lapor Ke Dinas dan menyelesaikan administrasi serta criteria pemilihan sekolah uji coba
- Pengarahan kepada petugas mengenai apa yang harus dikerjakan pada saat uji coba.
- Mengujicobakan model kurikulum serta melihat keterlaksanaannya.
- Pamit pulang ke (Dinas Pendidikan, Sekolah ) mengecek kembali admininstrasi
- Membuat laporan

## 7. Analisis Hasil Ujicoba

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis hasil dari ujicoba yang telah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkah kegiatannya yaitu:

- Menganalisis data hasil uji coba
- Menyimpulkan hasil temuan
- Membuat Laporan analisis uji coba

## 8. Perbaikan Model

Setelah menganalisis data yang diperoleh dari lapangan, maka dilakukan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki model berdasarkan hasil ujicoba.

Acara kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Pengarahan dari pimpinan/penanggungjawab
- Penjelasan kegiatan dari koordinator
- Para ahli memberi masukan untuk perbaikan model kurikulum
- Memperbaiki model berdasarkan masukan dari uji coba dan dari ahli
- Membuat laporan perbaikan

## 9. Presentasi Model

Mempresentasikan model yang bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan model. Adapun acara kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Pembukaan dan Pengarahan dari pimpinan/penanggungjawab

- Presentasi model kurikulum untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang telah diperbaiki sebelumnya.
- Membuat laporan

#### 10. Penyempurnaan Model

Menghasilkan model akhir berdasarkan masukan dari kegiatan sebelumnya. Acara kegiatannya adalah sebagai berikut:

- Menyempurnakan model berdasarkan masukan dari kegiatan presentasi pada langkah kegiatan ke 9.
- Membuat laporan kegiatan

#### 11. Penyusunan Laporan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun laporan akhir.

B.  
Jadwal Kerja

### **C. Unsur yang Terlibat**

Dalam pembuatan model pembelajaran untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, ada beberapa unsur yang terlibat, yaitu:

1. Ahli/Dosen
2. Guru SD untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
3. Guru SD untuk mata pelajaran Matematika.
4. Dikdas
5. Puspendik
6. Puskur

